



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN


RENCANA STRATEGIS


DPMPTSP Kota Balikpapan

2025-2029




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 investasi.balikpapan.go.id

 [dpmptsp_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)

 [dpmptbpp](https://www.facebook.com/dpmptbpp)

 +62 815-4500-0010

 Jl. Ruhui Rahayu I No. 9, Balikpapan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun. Renstra disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode lima tahunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dihadapkan pada tantangan dan peluang besar dalam sektor penanaman modal dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perencanaan strategis yang matang dan terarah menjadi kebutuhan mutlak agar DPMPTSP dapat menjawab dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan nasional maupun daerah secara adaptif dan responsif.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan

Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), pengukuran kinerja, serta pengawasan dan evaluasi capaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
14. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 2042;
 39. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
 40. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 41. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 42. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada setiap akhir tahun dalam

kurun waktu lima tahun kedepan dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Balikpapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing masing.
4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk masa periode tahun 2025 - 2029.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terhadap program program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kota Balikpapan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPSTSP KOTA BALIKPAPAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut IKK untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bagian ini mengemukakan mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan, dukungan BUMD

dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis. Pada bagian ini direview kembali faktor faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2024 – 2026 dan/atau Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- 4.2. Cascading kinerja
Perangkat Daerah Cascading kinerja Perangkat Daerah mluai dari tujuan,sasaran,outcame dan output serta indikator masing- masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- 7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
- n. pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;

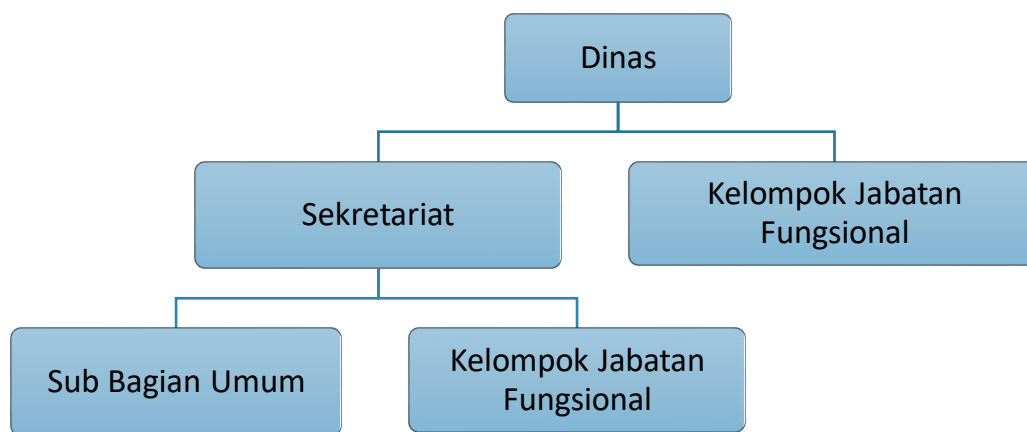
- o. penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 terdiri dari :

- a) Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



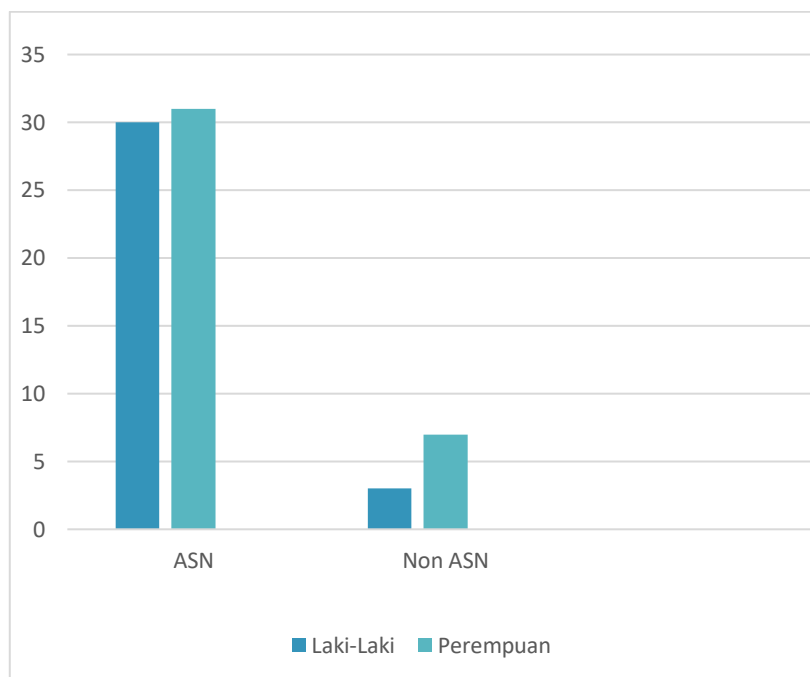
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPSTP Kota Balikpapan sudah didukung oleh aparatur pelayanan penanaman modal dengan jumlah personil sebanyak 71 orang terdiri dari 61 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 2.1

Jumlah Aparatur DPMPTSP berdasarkan jenis kelamin



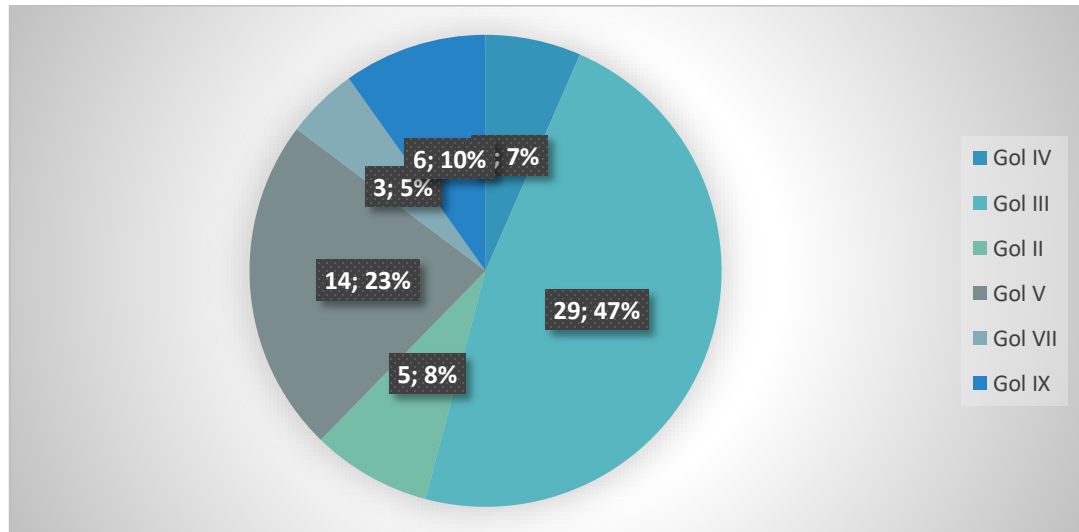
Tabel 2.1

Jumlah Aparatur berdasarkan Eselon / Non Eselon

No	Eselon/Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
4.	Fungsional	Jabatan Fungsional	12 Orang
5.	Non Eselon	Staf	46 Orang
6.	Non ASN	Staf	10 Orang
Jumlah Keseluruhan			71 Orang

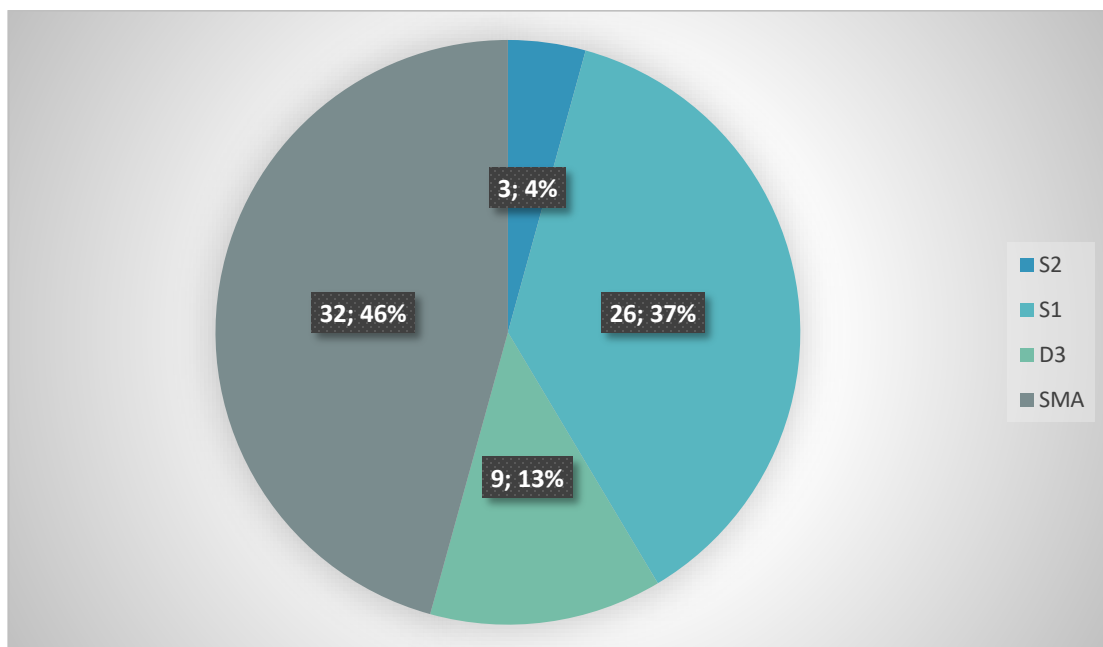
Grafik 2.2

Jumlah Aparatur DPMPTSP berdasarkan golongan



Grafik 2.3

Jumlah Aparatur DPMPTSP berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata aparatur DPMPTSP Kota Balikpapan golongan III dengan 29,47% atau 29 orang serta dengan tingkat pendidikan SMA dengan 32,46% atau 32 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Balikpapan memiliki sarana dan prasarana sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2**Sarana Prasarana DPMPTSP kota Balikpapan**

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	1
2	Telephone (PABX)	Unit	1
3	Telephone Mobile	Unit	3
4	Handy Talky (HT)	Unit	4
5	Facsimile	Unit	1
6	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	Unit	2
7	Alat Kedokteran Umum Lainnya	Unit	2
8	Video Printer	Unit	1
9	Distiling Apparatus	Unit	6
10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar Lainnya	Unit	1
11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan Lainnya	Unit	1
12	Layar	Unit	1
13	Recorder Display Lainnya	Unit	10
14	Uninterrupted Power Supply	Unit	1
15	Air Purlier	Unit	10
16	Target Drone	Unit	3
17	Local Area Network	Unit	2
18	P.C Unit	Unit	106
19	Laptop	Unit	19
20	Note Book	Unit	30
21	Tablet PC	Unit	32
22	Personal Komputer Lainnya	Unit	2
23	CPU	Unit	1
24	Hard Disk	Unit	3
25	Peralatan Mainframe Lainnya	Unit	1
26	Scanner	Unit	4
27	CPU	Unit	2
28	Monitor	Unit	3
29	Printer	Unit	108
30	Scanner	Unit	2
31	External	Unit	2
32	Mesin Antrian	Unit	1
33	Papan Nama Instansi	Unit	3
34	Papan Pengumuman	Unit	26
35	Alat Kantor Lainnya	Unit	89
36	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	2
37	Meja Kerja Kayu	Unit	4
38	Kursi Besi/Metal	Unit	63
39	Meja Rapat	Unit	2
40	Tempat Tidur Besi	Unit	1

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
41	Meja Tambahan	Unit	1
42	Kursi Rapat	Unit	4
43	Kursi Tamu	Unit	7
44	Kursi Putar	Unit	1
45	Kursi Lipat	Unit	6
46	Sofa	Unit	11
47	Meubeleur Lainnya	Unit	2
48	Lemari Es	Unit	2
49	A.C Window	Unit	3
50	A.C Split	Unit	9
51	Televisi	Unit	32
52	Loudspeaker	Unit	1
53	Sound System	Unit	4
54	Wireless	Unit	2
55	Microphone	Unit	2
56	Unit Power Supply	Unit	14
57	Camera Video	Unit	1
58	Tangga Aluminium	Unit	2
59	Dispenser	Unit	5
60	Gordyin/Kray	Unit	2
61	Bracket Standing Peralatan	Unit	4
62	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
63	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	8
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
65	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Unit	2
66	Audio Visual	Unit	1
67	Microphone/Wireless MIC	Unit	3
68	Uninterrupted Power Supply	Unit	27
69	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	4
70	Off Air TV Monitor	Unit	4
71	Camera Elektronik	Unit	2
72	Layar Film/Projector	Unit	4
73	Camera Digital	Unit	2
74	Camera Conference	Unit	4
75	Mesin Barcode	Unit	1
76	Portabel Generating Set	Unit	1
77	Station Wagon	Unit	9
78	Micro Bus	Unit	1
79	Mini Bus	Unit	5
80	Sepeda Motor	Unit	18
81	R O L	Unit	1
82	Multisester Digital	Unit	2
83	Global Positioning System	Unit	7
84	Alat Ukur Universal Lainnya	Unit	2
85	Termometer Standar	Unit	1
86	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya	Unit	1

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
87	Rak-Rak Penyimpan	Unit	7
88	Mesin Ketik Manual Portabel	Unit	1
89	Mesin Ketik Manual Standard	Unit	2
90	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lainnya	Unit	2
91	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1
92	Lemari Besi/Metal	Unit	18
93	Rak Besi	Unit	38
94	Rak Kayu	Unit	5
95	Filing Cabinet Besi	Unit	15
96	Brandkas	Unit	2
97	CCTV	Unit	4
98	Alat Penghancur Kertas	Unit	3
99	Mesin Absensi	Unit	4
100	LCD Projector/Infocus	Unit	1
101	Alat Sidik Jari	Unit	2
102	External/Portabel Hardisk	Unit	4
103	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	9
104	Server	Unit	3
105	Router	Unit	1
106	Modem	Unit	1
107	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	4
108	Air Conditioning	Unit	10
109	Peralatan Permainan Lainnya	Unit	1
110	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2
111	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Unit	1
112	Buku Umum Lain-Lain	Unit	26
113	CD/VCD/DVD/LD	Unit	2
114	Peta	Unit	1
115	Blue Print	Unit	1
116	Lisensi dan Frenchise	Unit	1
117	Software	Unit	3
118	Software Lainnya	Unit	5
119	Kajian	Unit	1
120	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Unit	4

Sumber data : KIP DPMPTSP Kota Balikpapan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan merujuk pada pengukuran dan penilaian terhadap kualitas serta efektivitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau organisasi kepada masyarakat. Pada sub bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Balikpapan. Capaian Kinerja penyelenggaraan Pelayanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp.)				3.018	3.169	3.328	3.530	3.780	14.369	19.593	15.426	24.125	25.705	4.76	6.18	4.64	6.83	6.80
2	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi				100	100	100	100	100	819	731	110	140	128	8.19	7.31	1.10	1.40	1.28
3	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat				0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.20	0.73	4.71	2.01	0.39	1.82	6.64	42.82	18.27	3.55
4	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan*						75	75.5	75.6			73.91	75.32	77.62			0.99	1.00	1.03
5	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal				N/A	5	5	5	5	N/A		0	0	0	N/A		0.00	0.00	0.00
6	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah				30	75	80	85	90			80	85	95			1.00	1.00	1.06
7	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya				N/A	100	100	100	100	N/A		100	100	100	N/A		1.00	1.00	1.00
8	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif				83.45	83.5	84	85	86			91.035	94.44	96			1.08	1.11	1.12
9	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan				66	66.5	67	68	69			88.17	96.63	97.53			1.32	1.42	1.41
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				75.23	77	78	79	80			78.02	92.77	94			1.00	1.17	1.18

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke - ('000)					Realisasi anggaran pada tahun ke - ('000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1,200	249,994	425,761	167,500	185,250	1,200	15,707	406,690	156,864	135,386	1.00	0.06	0.96	0.94	0.73	15337.50	11182.14
2	Program Promosi Penanaman Modal	18,451	300,000	664,995	4,101,000	693,674	18,451	197,184	657,024	3,594,844	662,922	1.00	0.66	0.99	0.88	0.96	3659.58	3492.91
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	146,985	564,890	713,127	575,260	1,239,202	146,835	422,658	537,317	535,341	991,091	1.00	0.75	0.75	0.93	0.80	743.08	574.97
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	279,080	999,002	811,999	751,939	918,391	268,114	716,288	779,285	698,924	812,142	0.96	0.72	0.96	0.93	0.88	229.08	202.91
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	375,358	980,934	570,485	374,320	462,914	358,534	916,285	551,749	365,557	426,499	0.96	0.93	0.97	0.98	0.92	23.33	18.96
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2,758,312	11,754,911	11,883,548	19,094,281	13,920,853	12,510,698	10,196,683	10,146,275	17,075,446	12,331,324	0.91	0.87	0.85	0.89	0.89	404.69	391.15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan internal Pemerintah Kota Balikpapan, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang kekuatan maupun kelemahan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Kekuatan (Strengths)

1. Pemanfaatan layanan digital (OSS RBA untuk perizinan berusaha, kanal antrian/track status, loket terintegrasi/MPP) yang terus membaik;
3. SDM frontliner berpengalaman, budaya pelayanan cukup kuat, dan jejaring koordinasi lintas-OPD sudah terbentuk;
4. Reputasi Balikpapan sebagai kota jasa & energi dengan ekosistem usaha mapan (perbankan, jasa profesional, logistik);
5. Kedekatan dengan pusat pemerintahan baru (IKN) menambah daya tarik investor dan arus informasi/regulasi;

b) Kelemahan (Weakness)

1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD Teknis Terkait dan adanya tumpang tindih kewenangan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Sarana dan Prasarana, Fasilitasi dan Sistem Teknologi Informasi yang belum sepenuhnya optimal di semua lini pelayanan;
3. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Usaha terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online;
4. Regulasi/Kebijakan Pusat yang berubah-ubah dan tumpang tindih sehingga sulit untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi di Kota Balikpapan.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan Eksternal Pemerintah Kota Balikpapan pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Peluang (Opportunities)

1. Kota Balikpapan sebagai salah satu dari tiga Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) membuka peluang besar untuk investasi baru di berbagai sektor;
2. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commerce dan bisnis investasi;
3. Peluang kemitraan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menarik minat investor terhadap sektor-sektor infrastruktur, properti dan pariwisata;
4. Situasi keamanan dan ketertiban Kota Balikpapan yang kondusif.

b) Tantangan (Threats)

1. Adanya Persaingan Antar Daerah lain di Kalimantan yang berlomba untuk menarik minat Investor, sehingga harus terus meningkatkan daya saing;
2. Perubahan Regulasi/kebijakan pusat dan daerah yang berubah-ubah dapat mempengaruhi iklim investasi;
3. Pelayanan Berbasis Digital rentan terhadap serangan siber jika tidak dilengkapi sistem keamanan yang memadai;
4. Kondisi Ekonomi Global yang mengalami Resesi atau krisis ekonomi dapat mengurangi minat investor.

2.5. Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu khususnya di Kota Balikpapan menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi baik dimasa sekarang maupun di masa mendatang, identifikasi permasalahan sangat diperlukan sebagai acuan dalam mendapatkan Solusi yang tepat dan terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan diantaranya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pemetaan Masalah DPMPSTSP Kota Balikpapan

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan nilai realisasi investasi	Belum optimalnya regulasi dan pengembangan sektor ekonomi potensial untuk mendukung iklim investasi	Belum terkininya regulasi terkait Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Belum optimalnya data potensi dan peluang investasi sebagai sumber data sektor ekonomi potensial
	Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan	Masih kurangnya profil atau ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi yang siap untuk ditawarkan
	Belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha
Belum optimalnya Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Belum optimalnya kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha	Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan
		Belum maksimalnya hasil survei kepuasan masyarakat
	Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha	Belum optimalnya akses terhadap informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui PPID
Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP	Belum optimalnya penerapan Nilai SAKIP	Kurangnya pemahaman penerapan Sakip pada Perangkat daerah

Setelah dilakukan identifikasi serta analisis permasalahan dan lingkungan yang telah dibahas sebelumnya, maka perlu dilakukan perumusan isu-isu strategis. Isu strategis adalah masalah-masalah prioritas yang harus segera ditangani untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Identifikasi dilakukan sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut disajikan tabel guna mempermudah dalam penyimpulan isu strategis :

Tabel 2.6

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Balikpapan sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition)	Belum optimalnya regulasi dan pengembangan sektor ekonomi potensial untuk mendukung iklim investasi	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	Ketahanan Ekonomi	Diversifikasi ekonomi	Belum Optimalnya Realisasi Investasi
Posisi Kota Balikpapan sebagai Pintu Gerbang Kaltim, Kaltara dan Rencana Ibukota Negara Baru serta Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan					
Pertumbuhan start-up digital, industri kreatif, dan UMKM berbasis teknologi, terutama di kota-kota besar, yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal					
Telah terdapat Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Berusaha		Konflik antar negara	Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan		Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha
	Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha					
Penyelenggaraan Birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik					

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga isu strategis yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Realisasi Investasi
2. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha
3. Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan berdasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Strategi dirumuskan berdasarkan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Pada bab ini juga memuat tentang penahapan Pembangunan yang dimaksudkan untuk menginformasikan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Balikpapan.

3.1.1. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai sedangkan sasaran adalah adalah penjabaran lebih rinci dari tujuan, yang merupakan langkah-langkah spesifik dan terukur yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu yang lebih pendek (biasanya tahunan). Dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan, dan sebagai penjabaran dari visi dan misi wali Kota terpilih Kota Balikpapan, dimana terdapat beberapa isu strategis menurut dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 yaitu antara lain : 1) Pembangunan Ekonomi inklusif berkelanjutan, 2) Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial, 3) Reformasi birokrasi berdampak dan tata kelola kolaboratif, 4) pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, dan ketahanan bencana, 5) Kualitas infrastruktur (yang terpadu) dan penataan utilitas kota, 6) Peningkatan kota cerdas dan nyaman dihuni, dan 7) Kesiapan sebagai Mitra IKN.

Dari tantangan pembangunan dan isu strategis yang telah dijabarkan diatas serta dengan memperhatikan arahan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur maka visi Kota Balikpapan yaitu “Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045” dapat kita lihat korelasinya sebagai berikut

Gambar 3.1

Telaahan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur serta Visi Kota Balikpapan



Sumber : Dokumen Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Penjabaran dari RPJPD Kota Balikpapan adalah penggalan RPJMD pada Pembangunan tahap I yaitu pada tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Penguatan ekonomi unggulan daerah
3. Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas
4. Memperkuat fondasi pembangunan berketahanan dan berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Kota Cerdas

Sedangkan visi dan misi Wali Kota Balikpapan terpilih tahun 2025-2029 yaitu

“ Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman “

Dengan penjabaran misi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat;
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan;
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan Masyarakat yang sehat dan terdidik;
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk manusia
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua

3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Bakan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan amanat peraturan dan undang – undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ (BKPM), visi BKPM adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing Melalui Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkelanjutan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pemerataan Pembangunan.”

Sedangkan Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif melalui penyederhanaan regulasi, perizinan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran.
2. Mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam dan industri strategis nasional guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.
3. Mengoptimalkan promosi investasi terintegrasi di tingkat nasional dan internasional dengan memanfaatkan potensi wilayah dan sektor unggulan Indonesia.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek investasi serta program hilirisasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang berbasis digital dan data melalui reformasi sistem pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

B. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025 2029 adalah :

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik, dan kesehatan;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya, dan kearifan lokal; dan
6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Visi diatas kemudian diwujudkan melalui misi yang ditetapkan pada masing-masing level dalam rangka menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur. Berikut penyandingan misi Astacita Presiden Republik Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta RPJMD Kota Balikpapan terhadap DPMPTSP Kota Balikpapan :

Misi (Astacita) Presiden 2025-2029	Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	DPMPTSP Kota Balikpapan
Astacita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif melalui penyederhanaan regulasi, perizinan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran	Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah	Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas
Astacita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam dan industri strategis nasional guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Astacita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek investasi serta program hilirisasi			

3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan acuan dalam penataan ruang kota, mencakup struktur ruang, polar uang, kawasan strategis serta arahan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Penetapan RTRW ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta mendukung sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Sebagai bagian dari penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menetapkan Rancangan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.

Analisis KLHS memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pencapaian TPB diimplementasikan berupa kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJPD agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu Kota Balikpapan juga disiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara karena berbatasan secara langsung. Sehingga dengan disusunnya RTRW dan KLHS Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, mengoptimalkan tata ruang dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi seyogyanya dapat berjalan sejalan dengan daya dukung ekosistem untuk menjamin keberlanjutan jangka Panjang.

Berdasarkan beberapa telaahan dan analisis terhadap tujuan serta sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan maka sebagai Perangkat Daerah pengampu pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu turut mendukung pencapaian **sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan** dengan mengembangkan perekonomian yang tumbuh

berkeadilan untuk semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. **Peningkatan nilai realisasi penanaman modal** merupakan salah satu indikator penyusun dalam perhitungan indikator sasaran RPJMD yaitu **PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Per Kapita** yaitu dari sisi **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dimana Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi dapat berbentuk investasi fisik dan finansial. Dalam konteks PDRB, investasi fisik digambarkan oleh indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB merupakan indikator yang menunjukkan penambahan atau pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. investasi oleh perusahaan dan Pemerintah diperhitungkan dan mendukung ketercapaian sasaran tersebut sehingga menjadi tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.

Sasaran Rencana Strategis merupakan ukuran spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam periode tertentu dan berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan kegiatan, mengalokasikan sumber daya dan mengevaluasi kinerja organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan memiliki dua sasaran yaitu sarsaran pertama : **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas** dengan indikator Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan, dimana indikator tersebut mengukur Peningkatan Layanan Investasi dan perizinan diukur dari penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menjadi tolak ukur pencapaian target kinerja dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Balikpapan serta indikator tambahan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan.

Sasaran kedua yaitu **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang merupakan upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Sasaran ini diwujudkan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengintegrasikan seluruh tahapan manajemen kinerja, dari perencanaan sampai dengan evaluasi sehingga indikator tersebut mengakomodir tolak ukur kinerja pada peningkatan layanan internal guna mendukung ketercapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.

Keterhubungan NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan, Tujuan, Sasaran serta indikator Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan tahun 2025 sampai dengan 2029 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

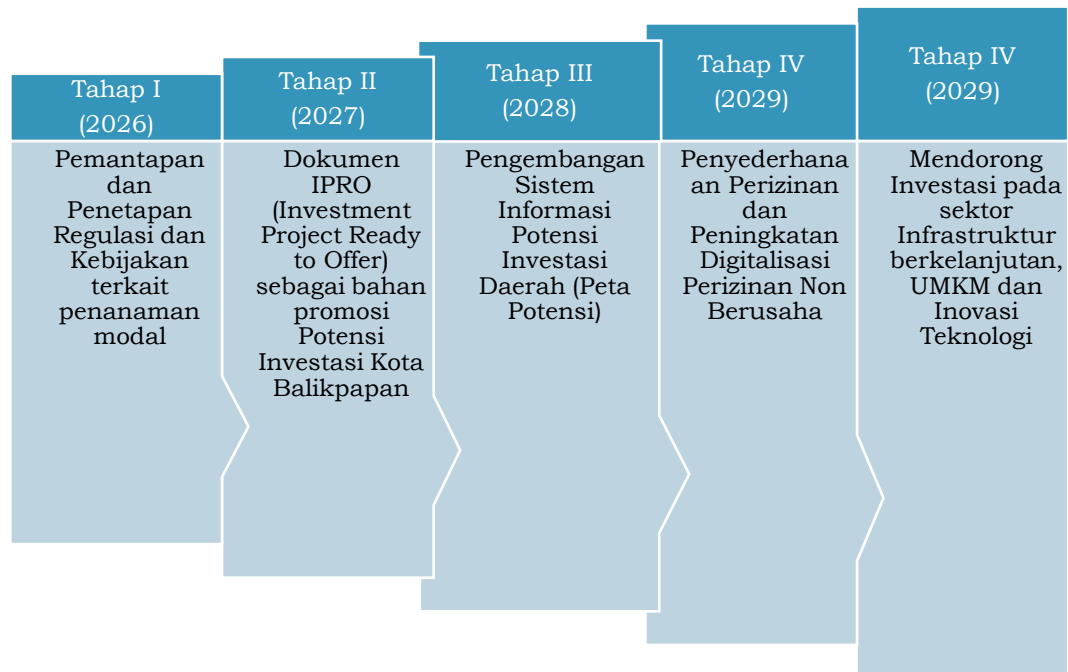
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal		Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	20	22.00	22.11	22.28	22.50	22.78	23.12	
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan (%)	10.21	15.21	20.21	25.21	30.21	35.21	40.21	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan (poin)	95.50	95.52	95.54	95.58	95.62	95.66	96.20	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75.32	77.62	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.1.1 Strategi Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Penahapan merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan.

Gambar 3.2
Penahapan Pembangunan DPMPTSP Kota Balikpapan 2025-2029



Tahapan Pembangunan DPMPTSP Kota Balikpapan memiliki tema Pembangunan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

3.1.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas, prinsip, atau pedoman yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam konteks pembangunan atau organisasi. Arah kebijakan ini menjadi panduan dalam merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada penyusunan arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada prinsipnya mengacu pada operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Tabel 3.2
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pemutakhiran data potensi dan peluang investasi sebagai sumber data sektor ekonomi potensial	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		Mendorong Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pengembangan destinasi wisata potensial	Memaksimalkan media promosi dan ketersediaan informasi terkait peluang investasi	
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pemanfaatan Sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan yang mendukung kemudahan berusaha	
		Optimalisasi akses terhadap informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui PPID	
Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Optimalisasi fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah meliputi:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan			Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)			
					Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan (%)			
					Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan (Indeks)			
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Tersusunnya Regulasi Kemudahan Penanaman Modal			Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
				Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase investor potensial (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				18.749.639.000		19.312.128.000		20.277.734.000		20.683.289.000		21.303.788.000
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.843.690.311		16.621.126.711		16.873.528.818		17.366.043.797		17.832.484.755
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94,32	94,57	15.843.690.311	94,82	16.621.126.711	95,07	16.873.528.818	95,32	17.366.043.797	95,57	17.832.484.755
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.287.036.000		10.287.036.000		10.287.036.000		10.492.776.720		10.702.632.254
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	71	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.492.776.720	77	10.702.632.254
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.287.036.000		10.287.036.000		10.287.036.000		10.492.776.720		10.702.632.254
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	71	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.492.776.720	77	10.702.632.254
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		736.507.082		765.671.287		937.229.009		1.011.345.879
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	1	736.507.082	1	765.671.287	1	937.229.009	1	1.011.345.879
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71	0		78		78		78		78	
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		100.000.000		105.000.000		107.100.000		110.313.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	1	100.000.000	1	105.000.000	1	107.100.000	1	110.313.000
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		636.507.082		660.671.287		830.129.009		901.032.879
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71	0	0	78	636.507.082	78	660.671.287	78	830.129.009	78	901.032.879

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.435.822.687		1.385.822.687		1.436.662.856		1.464.196.219		1.512.509.518
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1.435.822.687	1	1.385.822.687	1	1.436.662.856	1	1.464.196.219	1	1.512.509.518
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0		1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55		55		55					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	3		3		3					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3		3		3					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3		3		3					
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					59.994.690				59.994.690			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	59.994.690	1	59.994.690	1	62.994.425	1	64.254.313	1	66.181.942

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.408.953		76.408.953		80.229.400		81.833.988		84.289.008
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3	76.408.953	3	76.408.953	3	80.229.400	3	81.833.988	3	84.289.008
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				553.999.755		503.999.755		529.199.743		539.783.738		555.977.250
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	3	553.999.755	3	503.999.755	3	529.199.743	3	539.783.738	3	555.977.250
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				99.995.270		99.995.270		104.995.034		107.094.934		110.307.782
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	99.995.270	3	99.995.270	3	104.995.034	3	107.094.934	3	110.307.782
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.383.000		80.383.000		84.402.150		86.090.193		88.672.900
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	80.383.000	1	80.383.000	1	84.402.150	1	86.090.193	1	88.672.900

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				565.041.019		515.041.019		522.342.104		531.589.053		551.924.136
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55	565.041.019	55	515.041.019	55	522.342.104	55	531.589.053	55	551.924.136
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		50.000.000		52.500.000		53.550.000		55.156.500
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	53.550.000	1	55.156.500
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				249.600.000		299.600.000		314.580.000		320.871.600		330.497.748
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	249.600.000	2	299.600.000	2	314.580.000	2	320.871.600	2	330.497.748
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		1		1		1	
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				249.600.000		249.600.000		262.080.000		267.321.600		275.341.248
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	249.600.000	2	249.600.000	2	262.080.000	2	267.321.600	2	275.341.248

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		50.000.000		52.500.000		53.550.000		55.156.500
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	53.550.000	1	55.156.500
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.523.586.360		2.564.515.678		2.654.551.148		2.707.642.171		2.788.871.436
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.523.586.360	1	2.564.515.678	1	2.654.551.148	1	2.707.642.171	1	2.788.871.436
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	6		6		6		6			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.250.000		5.355.000		5.515.650
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.355.000	1	5.515.650
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		650.000.000		682.500.000		696.150.000		717.034.500
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	650.000.000	3	650.000.000	3	682.500.000	3	696.150.000	3	717.034.500
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.868.586.360		1.909.515.678		1.966.801.148		2.006.137.171		2.066.321.286
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	6	1.868.586.360	6	1.909.515.678	6	1.966.801.148	6	2.006.137.171	6	2.066.321.286

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.347.645.264		1.347.645.264		1.415.027.527		1.443.328.078		1.486.627.920
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	28	1.347.645.264	28	1.347.645.264	28	1.415.027.527	28	1.443.328.078	28	1.486.627.920
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	94		94		94		94		94	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1	
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				822.677.164		822.677.164		863.811.022		881.087.243		907.519.860
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	28	822.677.164	28	822.677.164	28	863.811.022	28	881.087.243	28	907.519.860
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				364.968.100		364.968.100		383.216.505		390.880.835		402.607.260
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	94	364.968.100	94	364.968.100	94	383.216.505	94	390.880.835	94	402.607.260
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.000.000		160.000.000		168.000.000		171.360.000		176.500.800
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	168.000.000	1	171.360.000	1	176.500.800

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				215.000.000		465.000.000		515.023.443		854.873.069		935.059.946
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	128	100	215.000.000	100	465.000.000	100	515.023.443	100	854.873.069	100	935.059.946
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0		50.000.000		52.500.000		103.550.000		55.156.500
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	103.550.000	1	55.156.500
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12	0		15		15		15		15	
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0		0		0		1		0	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0		0		0		50.000.000		0
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				0		25.000.000		26.250.000		26.775.000		27.578.250
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12	0	0	15	25.000.000	15	26.250.000	15	26.775.000	15	27.578.250

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				0		25.000.000		26.250.000		26.775.000		27.578.250
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0	0	1	25.000.000	1	26.250.000	1	26.775.000	1	27.578.250
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				215.000.000		415.000.000		462.523.443		751.323.069		879.903.446
Terbitnya dokumen peta potensi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	215.000.000	1	415.000.000	1	462.523.443	1	751.323.069	1	879.903.446
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	1		1		1		1		1	
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000		140.000.000		147.000.000		149.940.000		154.438.200
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	140.000.000	1	140.000.000	1	147.000.000	1	149.940.000	1	154.438.200
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				75.000.000		275.000.000		315.523.443		601.383.069		725.465.246
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1	75.000.000	1	275.000.000	1	315.523.443	1	601.383.069	1	725.465.246

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				912.392.310		912.392.310		1.512.392.310		932.140.156		960.104.361
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor Potensial	8,3	25	912.392.310	33,3	912.392.310	35	1.512.392.310	37,03	932.140.156	37,8	960.104.361
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				912.392.310		912.392.310		1.512.392.310		932.140.156		960.104.361
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	5	912.392.310	5	912.392.310	5	1.512.392.310	5	932.140.156	5	960.104.361
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0		1		1		1		1	
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				912.392.310		862.392.310		1.462.392.310		879.640.156		906.029.361
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	5	912.392.310	5	862.392.310	5	1.462.392.310	5	879.640.156	5	906.029.361
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				0		50.000.000		50.000.000		52.500.000		54.075.000
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000	1	54.075.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.011.450.379		508.147.679		531.055.063		543.176.164		559.471.449
Meningkatnya Perizinan Berusaha Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	97,72	97,82	1.011.450.379	97,92	508.147.679	98,02	531.055.063	98,12	543.176.164	98,22	559.471.449
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.011.450.379		508.147.679		531.055.063		543.176.164		559.471.449
Terlaksananya Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.088	13.153	1.011.450.379	13.219	508.147.679	13.285	531.055.063	13.352	543.176.164	13.418	559.471.449
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.678	8.000		7.000		60.000		5.000		4.000	
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	176	110		121		133		146		161	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0		5		5		5		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				0		50.000.000		50.000.000		52.500.000		54.075.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	52.500.000	5	54.075.000
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				753.302.700		200.000.000		210.000.000		214.200.000		220.626.000
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.088	13.153	753.302.700	13.219	200.000.000	13.285	210.000.000	13.352	214.200.000	13.418	220.626.000
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				106.198.727		106.198.727		111.508.663		113.738.837		117.151.002
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.678	8.000	106.198.727	7.000	106.198.727	60.000	111.508.663	5.000	113.738.837	4.000	117.151.002
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				151.948.952		151.948.952		159.546.400		162.737.327		167.619.447
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	176	110	151.948.952	121	151.948.952	133	159.546.400	146	162.737.327	161	167.619.447

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				343.303.000		360.468.150		378.491.558		510.468.150		525.782.195
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya	100	100	343.303.000	100	360.468.150	100	378.491.558	100	510.468.150	100	525.782.195
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				343.303.000		360.468.150		378.491.558		510.468.150		525.782.195
Terlaksananya Penyampaian LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	560	150	343.303.000	150	360.468.150	150	378.491.558	150	510.468.150	150	525.782.195
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	38	16		18		20		22		24	
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	4		5		6		7		8	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				110.248.000		115.760.400		121.548.420		165.760.400		170.733.212
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	4	110.248.000	5	115.760.400	6	121.548.420	7	165.760.400	8	170.733.212
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				153.500.000		161.175.000		169.233.750		211.175.000		217.510.250
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	560	150	153.500.000	150	161.175.000	150	169.233.750	150	211.175.000	150	217.510.250
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				79.555.000		83.532.750		87.709.388		133.532.750		137.538.733
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	38	16	79.555.000	18	83.532.750	20	87.709.388	22	133.532.750	24	137.538.733

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				423.803.000		444.993.150		467.242.808		476.587.664		490.885.294
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	423.803.000	100	444.993.150	100	467.242.808	100	476.587.664	100	490.885.294
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				423.803.000		444.993.150		467.242.808		476.587.664		490.885.294
Terlaksananya Permintaan Data dan informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	423.803.000	1	444.993.150	1	467.242.808	1	476.587.664	1	490.885.294
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				423.803.000		444.993.150		467.242.808		476.587.664		490.885.294
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	423.803.000	1	444.993.150	1	467.242.808	1	476.587.664	1	490.885.294

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
5.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	20	22	22,11	22,28	22,5	22,78	23,12	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,32	77,62	77,7	77,8	77,9	78	78,1	
4.	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	10,21	15,21	20,21	25,21	30,21	35,21	40,21	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95,5	95,52	95,54	95,58	95,62	95,66	96,2	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	20	22	22,11	22,28	22,5	22,78	23,12	Indikator Tujuan PD
2	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	10,21	15,21	20,21	25,21	30,21	35,21	40,21	Indikator Sasaran PD
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,32	77,62	77,7	77,8	77,9	78	78,1	Indikator Sasaran PD
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95,5	95,52	95,54	95,58	95,62	95,66	96,2	Indikator Sasaran PD
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	97,72	97,77	97,82	97,92	98,02	98,12	98,22	Indikator Program
6	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	94,32	94,4	94,57	94,82	95,07	95,32	95,57	Indikator Program
9	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	128	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
10	Persentase investor potensial	%	8,3	15,38	25	33,3	35	37,03	37,8	Indikator Program
11	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6,55	10	0,5	0,75	1	1,25	1,5	Indikator LPPD

BAB V

PENUTUP

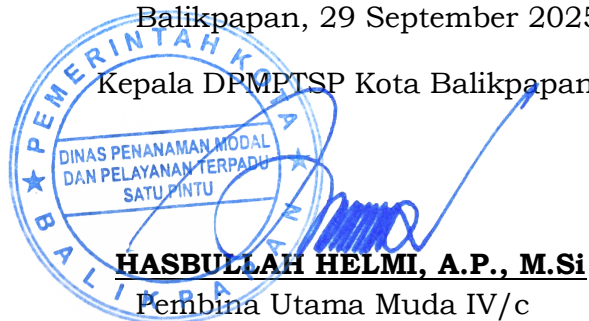
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMPTSP Kota Balikpapan agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2025-2029, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra DPMPTSP dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Balikpapan, 29 September 2025

Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan


HASBULLAH HELMI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c